

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan kesimpulan bahwa faktor penyebab utama dalam ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT pada tahun 2018-2022 berdasarkan konsep Chayes dan Chayes terletak pada faktor keterbatasan kapasitas konstitusi dan politik Brazil serta adanya perubahan dimensi kondisi politik ekstrem Brazil. Pengukuran analisis tersebut dapat dijabarkan pada tiap-tiap indikator konsep ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh Chayes dan Chayes:

1. Pada indikator ambiguitas ditemukan bahwa di dalam teks traktat ATT mengandung ambiguitas pelaksanaan yang mengakibatkan pemahaman negara terhadap kewajibannya menjadi berbeda-beda, dimana Bolsonaro memvalidasi kebijakannya sebagai bentuk upaya mematuhi ATT di Brazil. Akibat ambiguitas yang memicu kesalahan praktik tersebut, Brazil justru menjadi negara pelanggar yang membahayakan HAM masyarakat sipil.
2. Faktor dari keterbatasan kapasitas Brazil dalam mematuhi ATT juga mempengaruhi ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT dapat terjadi. Keterbatasan konstitusi Brazil yang memisahkan kuasa legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif telah menyebabkan dekrit Bolsonaro yang melanggar ATT dapat disahkan dan diberlakukan. Selain itu, sistem suara sebagai penentu keputusan final suatu kebijakan hukum Brazil menyebabkan suatu kebijakan yang dikeluarkan seorang presiden dapat disahkan meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan kebijakan

konstitusi dasar Brazil. Sehingga, upaya mematuhi kewajiban pencatatan dan pelacakan yang terdapat pada ATT menjadi sulit untuk dipatuhi.

3. Faktor ketiga Chayes dan Chayes yang turut menjadi faktor dominan dalam menjelaskan ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Perubahan dimensi politik dan sosial-ekonomi Brazil yang tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang diharapkan ATT menjadi pendorong ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT. Perubahan sosial-ekonomi masyarakat Brazil yang mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap keputusan dekrit Bolsonaro menjadi pemicu yang juga dominan dalam mendorong ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT.

Keterbatasan kapasitas politik Brazil serta bagaimana perubahan dimensi domestik negara dalam berusaha mematuhi traktat internasional nyatanya merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan suatu negara sesuai dengan konsep Chayes dan Chayes. Sistem hukum dan politik Brazil yang dipandang sangat demokrasi justru berpeluang untuk memunculkan hukum ekstrem yang sah seperti yang diterbitkan oleh Bolsonaro. Begitupun dengan dampak dari perubahan politik Brazil yang mampu mengubah komitmen Brazil terhadap ATT dari era patuh pada masa pemerintahan Dilma dan Michel menjadi tidak patuh yang dilakukan oleh Bolsonaro. Besarnya peran kepolisian federal Brazil dalam mengupayakan kepatuhan Brazil terhadap ATT juga turut menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Brazil. Adanya diskriminasi dan perpecahan antara penduduk kulit putih dengan kulit hitam juga menjadi faktor yang menyebabkan baku tembak menjadi hal yang tidak dapat dihindari yang kemudian memberikan urgensi mengenai bahayanya peredaran senjata pada kalangan masyarakat tersebut.

Maka, hal ini dapat dijelaskan bahwa Brazil merupakan negara yang bisa saja patuh terhadap ATT dengan melihat bagaimana statuta 2003 dan upaya pelacakan senjata yang sudah lama ada di Brazil. Namun, kehadiran konflik sosial yang didasari diskriminasi dan besarnya pengaruh kelompok PCC dan CV dan besarnya perlawanan Bolsonaro terhadapnya justru menjadikan kebijakan dekrit Bolsonaro sebagai ajang perang senjata di antara kedua kubu. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Brazil merupakan suatu fenomena yang beralasan sesuai dengan persepsi awal Chayes dan Chayes, dan bahwa disebabkan oleh faktor-faktor ambiguitas traktat, keterbatasan kapasitas negara, dan perubahan dimensi domestik negara. Ketidakpatuhan itu pula yang menyebabkan Brazil terhambat atau gagal dalam mematuhi ATT secara efektif.

5.2 Saran

Ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT diharapkan dapat mengalami perubahan di masa yang akan datang. Dengan adanya perubahan politik yang terjadi sejak akhir 2022, dimana Bolsonaro digantikan oleh Lula sebagai presiden Brazil saat ini, maka perubahan perilaku Brazil terhadap ATT diharapkan akan mengalami perubahan menjadi negara yang patuh. Berubahnya suatu dimensi yang terdapat pada domestik negara anggota, maka harapan akan adanya peningkatan kemampuan kapasitas negara terhadap kepatuhannya kepada traktat ATT dapat segera terjadi. Untuk itu, penulis menyarankan kepada penulis berikutnya untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan Brazil terhadap ATT pada era pemerintahan baru Brazil saat ini yang dipimpin oleh Lula. Sehingga hal tersebut dapat memperoleh penilaian mengenai bagaimana implementasi Brazil terhadap ATT

selaku aktor hubungan internasional yang berpengaruh dalam peredaran senjata ilegal dunia.

